



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

ANALISIS PENGARUH AKSES KEUANGAN DIGITAL P2P LENDING, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Dzikri Badaruzaman Al Haq ¹, Thomas Andrian ², Dian Fajarini ³

^{1 2 3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

dzikri.zaman@gmail.com

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 20 Mei 2025

Diterima: 11 November 2025

Terbit/Dicetak: 12 November 2025

Abstract

Income inequality continues to pose a significant challenge within Indonesia's economic landscape. This study aims to analyze the effect of digital financial access through peer-to-peer (P2P) lending, education, unemployment, and economic growth on income inequality across 34 provinces in Indonesia from 2020 to 2024. Grounded in the neoclassical theory of income distribution, human capital theory, and the Kuznets inverted-U hypothesis, this research employs a panel data regression model using the Fixed Effect Model (FEM). The results indicate that P2P lending, education, and unemployment have a significant effect on income inequality, with P2P lending, education and unemployment showing a negative relationship. Meanwhile, economic growth does not have a statistically significant effect on inequality.

Keywords:

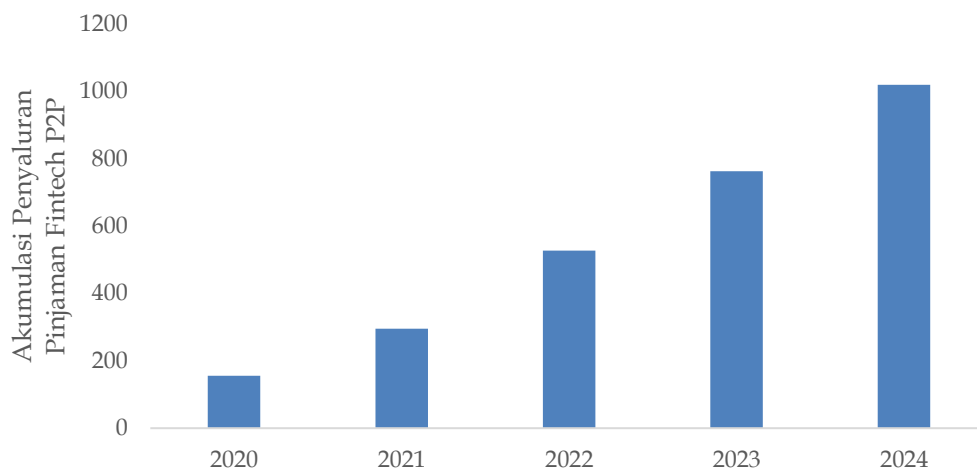
*Fintech peer-to-peer lending,
Ketimpangan pendapatan, inklusi
keuangan, pendidikan, pengangguran.*

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan yang terus membayangi proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan yang melebar antar wilayah dan kelompok sosial, sehingga menghambat tercapainya pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Sebagai otoritas moneter Bank Indonesia memiliki peran yang strategis tidak hanya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga dalam mendorong inklusi keuangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk menurunkan ketimpangan, karena memungkinkan masyarakat unbanked dan underbanked untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang selama ini tidak terjangkau. Akselerasi teknologi digital turut mendukung tercapainya inklusi tersebut, salah satunya melalui kehadiran inovasi di sektor *financial technology* (fintech), khususnya layanan peer-to-peer (P2P) lending. Layanan ini mempertemukan penyedia dan penerima kredit secara langsung melalui platform digital tanpa keterlibatan lembaga keuangan konvensional sebagai perantara, sehingga dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pembiayaan. P2P lending dinilai mampu menjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun individu dari sektor informal yang umumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan kredit perbankan.

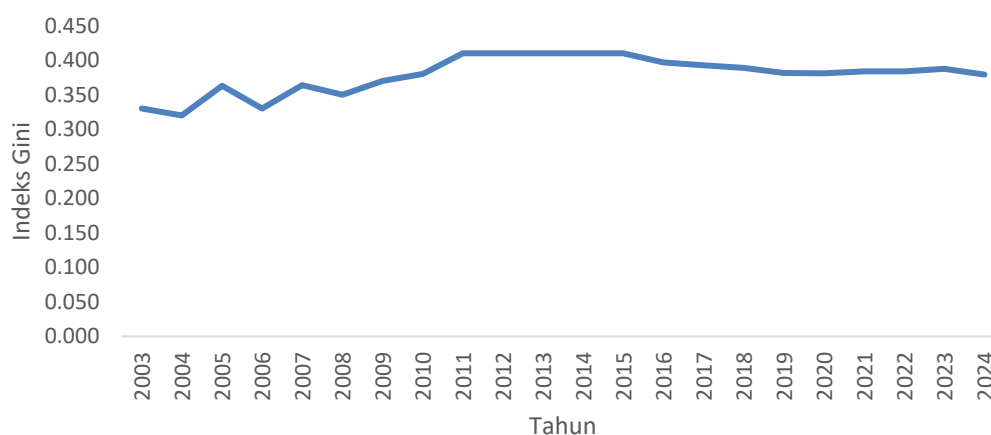
* Corresponding Author.

Dzikri Badaruzaman Al Haq, e-mail : dzikri.zaman@gmail.com



Gambar 1. Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech P2P Lending 2020-2024.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran P2P lending di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan pertumbuhan inklusi keuangan berbasis teknologi yang berpotensi memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang tidak terjangkau layanan keuangan formal. Melalui perluasan akses pembiayaan berbasis teknologi ini, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas dan pendapatan di kelompok masyarakat bawah, penciptaan lapangan kerja baru, serta perbaikan distribusi pendapatan secara bertahap. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi keuangan digital seperti P2P lending bukan hanya menjadi alat efisiensi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mempersempit jurang ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Gambar 2. Indeks Gini Indonesia 2003-2024.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini di Indonesia dalam dua dekade terakhir cenderung stagnan dengan sedikit peningkatan, mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini memerlukan langkah strategis untuk menguranginya agar tidak menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain akses keuangan tentunya terdapat factor-faktor lain yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Faktor struktural seperti pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi juga berperan penting. Dalam perspektif teori human capital, pendidikan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang berimplikasi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan individu. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memperlebar kesenjangan pendapatan, terutama di sektor

informal dan kelompok rentan. Sementara itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan tidak selalu linier. Hipotesis Kuznets menunjukkan bahwa ketimpangan akan membesar pada tahap awal pembangunan kemudian mengecil pada tahap lanjut, namun bukti empiris di negara berkembang termasuk Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana variabel-variabel struktural tersebut berinteraksi dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh fintech P2P lending, pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada periode 2020–2024.

Penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Sari & Saraswati (2022) dan Adugna (2024) menyatakan bahwa ekspansi fintech P2P lending dapat menurunkan ketimpangan melalui peningkatan pemerataan akses keuangan. Hindun et al., (2019) menemukan hubungan negatif antara pendidikan dan ketimpangan, sedangkan Khoirudin & Musta'in (2020) menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Sementara Dwiputra, (2018) & Firdhausy et al., (2023) menunjukkan adanya hubungan negatif dari pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menyumbangkan bukti empiris guna memperdalam pemahaman mengenai determinan ketimpangan pendapatan di era keuangan digital, serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Distribusi Pendapatan Neo Klasik

Teori distribusi pendapatan neoklasik menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan dalam kontribusi antar factor-faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja terhadap proses produksi. Setiap faktor produksi mendapatkan pendapatan sesuai dengan produktivitas marginalnya (*marginal productivity theory*), sehingga individu atau kelompok yang memiliki faktor produksi lebih produktif akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Mankiw, 2019). Dalam kerangka ini, distribusi pendapatan dianggap sebagai hasil dari mekanisme pasar yang efisien, di mana harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun, teori ini juga mengasumsikan adanya pasar persaingan sempurna dan mobilitas sempurna antar faktor produksi, yang dalam kenyataannya sering tidak terpenuhi. Ketimpangan dapat timbul ketika akses terhadap faktor produksi – seperti pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, atau akses modal untuk investasi – tidak merata antar individu atau kelompok. Dalam konteks ini, peran kebijakan publik menjadi penting untuk menciptakan redistribusi agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata. Selain itu, struktur ekonomi yang dualistik seperti di negara berkembang memperkuat segmentasi pasar tenaga kerja dan memperbesar ketimpangan. Teori ini menjadi landasan utama dalam menganalisis bagaimana berbagai variabel ekonomi, seperti pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan akses ke keuangan P2P lending, dapat memengaruhi distribusi pendapatan. Jika suatu variabel mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja atau memperluas akses terhadap faktor produksi, maka ia memiliki pengaruh untuk menekan ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mengacu pada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan antarkelompok dalam suatu masyarakat (Todaro & Smith, 2020). Ketimpangan yang tinggi dapat menjadi penghambat pembangunan yang berkelanjutan karena menciptakan jurang sosial, memperlemah kohesi ekonomi, dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal serta distribusi. Ketimpangan tersebut tercermin dalam variasi Indeks Gini antarwilayah, yang mengindikasikan perbedaan signifikan dalam distribusi hasil pembangunan. Secara empiris, ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, distribusi aset produktif, hingga perkembangan teknologi. Indeks Gini digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur ketimpangan, dengan nilai

antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang distribusi pendapatan. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja, perbedaan kualitas pendidikan, urbanisasi, dan ketimpangan akses keuangan. Oleh karena itu, untuk menurunkan ketimpangan diperlukan kebijakan yang bersifat inklusif dan menyasar sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, lapangan kerja, dan layanan keuangan berbasis teknologi.

Peer-to-Peer (P2P) Lending

Peer-to-peer (P2P) lending merupakan salah satu inovasi dalam sektor financial technology (fintech) yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak pemberi dana secara langsung melalui platform digital, tanpa melalui lembaga intermediasi keuangan tradisional seperti bank (POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Berdasarkan peruntukannya P2P lending menawarkan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit atau jaminan yang cukup untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, layanan ini dinilai berpotensi menjangkau kelompok masyarakat unbanked dan underbanked, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta individu di sektor informal. Secara teoritis, P2P lending berperan sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap faktor produksi berupa modal. Dalam kerangka teori distribusi pendapatan neoklasik, peningkatan akses terhadap faktor produksi akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan, terutama pada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan demikian, P2P lending berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan dengan cara memperbesar kontribusi kelompok bawah terhadap output ekonomi. Beberapa penelitian empiris mendukung hubungan negatif antara P2P lending dan ketimpangan pendapatan. menurut studi INDEF(2019) peer-to-peer lending dapat menurunkan tingkat ketimpangan (indeks gini) sebesar 0,01 di Indonesia. Adugna (2024) juga menemukan bahwa perkembangan fintech berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan yang berdampak pada pemerataan ekonomi. Demir et al. (2020) menemukan bahwa fintech lending dapat menurunkan ketimpangan pendapatan melalui saluran pembiayaan digital, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur keuangan formal.

Pendidikan dan Teori Modal Manusia

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental yang memengaruhi distribusi pendapatan dalam jangka panjang. Dalam kerangka teori modal manusia, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki produktivitas yang lebih besar dan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula (Becker, 1964). Teori ini menyatakan bahwa akumulasi modal manusia melalui pendidikan dapat meningkatkan kemampuan kerja, efisiensi, dan daya saing individu dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu jalur utama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat mobilitas sosial. Dalam konteks distribusi pendapatan, pendidikan memiliki dua peran penting. Pertama, pendidikan memungkinkan akses ke pekerjaan formal dengan upah lebih tinggi, sehingga memperbesar bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok berpendidikan. Kedua, pemerataan pendidikan dapat mempersempit kesenjangan kemampuan antarindividu dan wilayah, yang secara langsung berdampak pada kesenjangan pendapatan. Ketimpangan dalam akses pendidikan akan berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, karena kelompok yang tertinggal dalam pendidikan juga akan tertinggal dalam pendapatan dan kesejahteraan. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Putri (2022) menemukan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berkontribusi pada penurunan

ketimpangan pendapata. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Situmorang (2022), yang menunjukkan bahwa investasi pemerintah di bidang pendidikan secara konsisten menekan disparitas pendapatan antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan tinggi, merupakan strategi jangka panjang yang efektif untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Pengangguran

Pengangguran terjadi ketika sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja, sehingga tidak memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi. Dalam perspektif teori distribusi pendapatan fungsional, kondisi ini menyebabkan bagian pendapatan yang dialokasikan untuk tenaga kerja (wage share) menurun, sementara pemilik modal tetap menerima keuntungan, sehingga memperbesar ketimpangan pendapatan (Mankiw, 2019). Teori Keynesian memandang pengangguran sebagai akibat dari lemahnya permintaan agregat, yang menurunkan daya beli masyarakat dan memperlebar jurang antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Sementara itu, teori dualisme pasar tenaga kerja (Doeringer et al., 1972) menjelaskan bahwa ketimpangan juga bersumber dari dominasi pekerjaan di sektor informal atau pasar sekunder, yang ditandai dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Di negara berkembang seperti Indonesia, banyak pekerja berada di pasar sekunder atau bahkan menganggur, yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang layak dan peningkatan partisipasi tenaga kerja dalam sektor formal menjadi kunci untuk menekan ketimpangan pendapatan secara struktural.

Pertumbuhan Ekonomi dan Hipotesis U-Terbalik Kuznet

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan output produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam kurun waktu tertentu, yang lazimnya diukur melalui pertumbuhan PDB riil tahunan (Todaro & Smith, 2020). Hipotesis Kuznets (1955) menjelaskan bagaimana hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi bersifat tidak linier, di mana pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat akibat peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang lebih produktif. Namun, seiring waktu dan meningkatnya investasi sosial serta intervensi pemerintah melalui kebijakan redistribusi, ketimpangan akan menurun pada tahap pembangunan lanjutan. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk kurva U terbalik (inverted-U). Ekonomi yang tumbuh secara signifikan berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan individu, dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Studi yang dilakukan oleh Dwiputra, (2018) & Firdhausy et al., (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Sumber data diperoleh dari berbagai lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan Eviews 12 dengan analisis regresi berganda untuk data panel. Analisis ini melibatkan 4 variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel-variabel bebas yang diterapkan mencakup fintech peer-to-peer lending, pendidikan, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun penjabaran definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

| Variabel | Jenis | Satuan/Ukuran | Definisi Operasional | Sumber Data |
|---------------------------------|------------|---------------|---|-------------|
| Indeks Gini (GINI) | Dependen | Rasio (0-1) | Indikator ketimpangan distribusi pendapatan; nilai 0 menunjukkan distribusi merata, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. | BPS |
| P2P Lending (P2P) | Independen | Miliar rupiah | Total nilai penyaluran pinjaman melalui platform peer-to-peer lending di masing-masing provinsi. | OJK |
| Pendidikan (PDK) | Independen | Tahun | Rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥25 tahun; mencerminkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia produktif. | BPS |
| Pengangguran (TPT) | Independen | Persen (%) | Tingkat pengangguran terbuka; dihitung sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. | BPS |
| Pertumbuhan Ekonomi (PE) | Independen | Persen (%) | Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil tahunan provinsi; menggambarkan peningkatan nilai total output ekonomi. | BPS |

Metode Analisis Data

Guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai adanya hubungan antara variabel independen dan dependen, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Metode analisis yang diterapkan yaitu regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Data panel sendiri merupakan kombinasi dari data cross-section dan time series, yakni data yang dikumpulkan dari beberapa unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mengestimasi model regresi data panel, penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama: Model Common Effect, Model Fixed Effect, dan Model Random Effect. Pemilihan model yang paling sesuai dilakukan melalui serangkaian uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM), sesuai dengan rekomendasi dari Widarjono (2018). Adapun model spesifik yang akan digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dibawah ini::

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 P2P_{it} + \beta_2 PDK_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PE_{it} + \mu_i + e_{it}$$

Keterangan:

GINI = Indeks Gini

P2P = Fintech Peer-To-Peer Lending

PDK = Pendidikan

TPT = Pengangguran

PE = Pertumbuhan Ekonomi

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi variable independen

β_0 = Konstanta

i = Provinsi t = Tahun

Untuk menjamin validitas model regresi yang digunakan, penelitian ini melakukan serangkaian uji asumsi klasik. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera, sedangkan multikolinearitas dianalisis melalui korelasi antar variabel independen. Deteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan pendekatan White, sementara autokorelasi diuji menggunakan metode Breusch-Godfrey. Selain itu, model dievaluasi melalui uji F-statistik guna mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, serta uji t-statistik untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Koefisien determinasi (R^2) juga dihitung untuk menilai proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh keseluruhan model regresi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih berdasarkan pertimbangan hasil uji Chow dan Hausman. Proses estimasi akhir dilakukan menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS) dengan pembobotan cross-section dan koreksi standard error White cross-section. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi

permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam model, sehingga dapat memperoleh hasil estimasi yang lebih optimal. Adapun hasil regresi dari penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Estimasi Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.480284 | 0.010185 | 47.15792 | 0.0000 |
| LN_P2P | -0.008549 | 0.001604 | -5.328723 | 0.0060 |
| PDK | -0.006633 | 0.001742 | -3.808756 | 0.0190 |
| TPT | -0.003191 | 0.001077 | -2.961989 | 0.0415 |
| PE | 0.000446 | 0.000269 | 1.656203 | 0.1730 |

Dari persamaan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peer-to-peer lending

Variabel peer-to-peer lending (P2P) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,008549. Berdasarkan bentuk satuan pada variabel peer-to-peer lending yang berupa miliar rupiah, maka model variabel tersebut mengartikan bahwa setiap terjadi penambahan 1 miliar rupiah pada penyaluran pinjaman peer-to-peer lending maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia senilai -0,0085 poin. Probabilitas yang dihasilkan bernilai 0.0060 yang dimana angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan α 0.05 memastikan bila variabel tersebut memengaruhi secara signifikan.

2. Pendidikan

Variabel Pendidikan (PDK) memiliki nilai koefisien sebesar -0,006633. Mengingat satuan pada variabel ini adalah tahun, maka dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar satu tahun berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0,006 poin. Nilai probabilitas (p-value) yang dihasilkan adalah 0,0190 dimana angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan α 0.05 menunjukkan bahwa variabel tersebut mempengaruhi secara signifikan..

3. Pengangguran

Variabel Tingkat Pengangguran mendapatkan koefisien sebesar -0,003191. Karena variabel ini dinyatakan dalam persen, maka dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan TPT sebesar 1% akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,0031 poin. Nilai probabilitas (p-value) yang diperoleh adalah 0,0415, yang berada di bawah ambang signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Oleh karena itu, variabel TPT terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada tingkat signifikansi 5%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) menunjukkan koefisien sebesar 0,000446. Karena dinyatakan dalam satuan persen, maka hal ini dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% berkorelasi dengan kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 0,00044 poin. Meski demikian, nilai probabilitas (p-value) yang dihasilkan sebesar 0,1730, melebihi batas signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Oleh sebab itu, dalam model penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Uji Hipotesis Statistik

Tabel 3 Hasil Uji t-statistik

| Variabel | t-statistic | t-tabel ($\alpha=5\%$) | Probabilitas | Kesimpulan |
|----------|-------------|--------------------------|--------------|----------------|
| P2P | -5,328723 | 1,654 | 0,0060 | Tolak H0 |
| PDK | -3,808756 | 1,654 | 0,0190 | Tolak H0 |
| TPT | -2,961989 | 1,654 | 0,0415 | Tolak H0 |
| PE | 1,656203 | 1,654 | 0,1730 | Gagal tolak H0 |

Uji t-statistik: Hasil uji-t menunjukkan bahwa P2P Lending ($t = -5,3287$, $p = 0,0060$), Pendidikan ($t = -3,8088$, $p = 0,0190$), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ($t = -2,9620$, $p = 0,0415$) berpengaruh

signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia secara parsial. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi (PE) ($t = 1,6562$, $p = 0,1730$) tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial.

Tabel 4 Hasil Uji F-statistik

| df(k-1 ; n-k) | F-statistic | F-tabel | Probabilitas | Kesimpulan |
|---------------|-------------|---------|--------------|------------|
| 4;165 | 142,2154 | 1,654 | 0,0000 | Tolak H0 |

Uji F menghasilkan nilai F-statistik sebesar 142,2154 dengan probabilitas 0,0000, menunjukkan bahwa P2P Lending, Pendidikan, TPT, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9755 dan Adjusted R^2 sebesar 0,9686 mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 97,55% variasi ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024 dan 2,45% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori distribusi pendapatan neoklasik yang menyatakan bahwa akses terhadap faktor produksi, termasuk modal, mempengaruhi distribusi pendapatan. P2P Lending memfasilitasi akses modal bagi individu dan UMKM yang sebelumnya mungkin terbatas, sehingga meningkatkan produktivitas dan berpotensi mengurangi ketimpangan. Secara empiris, hasil ini didukung oleh penelitian Hailu Adugna (2024) yang menemukan bahwa perkembangan fintech lending meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan. Namun, temuan ini berbeda dengan Sari & Saraswati (2022) yang tidak menemukan pengaruh signifikan di Jawa Tengah. Koefisien negatif yang kecil dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun arah pengaruhnya sesuai dengan teori dan beberapa bukti empiris, skala dampaknya terhadap pemerataan pendapatan masih perlu ditingkatkan, mungkin melalui perluasan jangkauan layanan P2P.

Penelitian ini juga menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara Pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024. Landasan teoritis untuk temuan ini kuat, terutama melalui teori Modal Manusia (Becker, 1964) yang menjelaskan bahwasanya pendidikan adalah investasi yang dapat menambahkan keterampilan dan produktivitas, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan distribusi yang lebih merata. Secara empiris, hasil ini konsisten dengan penelitian Hindun, Soejoto, dan Hariyati (2019) yang juga menemukan pengaruh negatif dan signifikan pendidikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan secara luas diharapkan dapat mengurangi disparitas pendapatan antar individu dan kelompok.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024. Hasil ini tidak sesuai dengan perspektif teori distribusi pendapatan neoklasik, pengangguran seharusnya memperburuk ketimpangan karena hilangnya sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat. Namun, dalam konteks pasar tenaga kerja dualistik seperti di Indonesia (Doeringer & Piore, 1971), peningkatan pengangguran dapat mendorong lebih banyak orang ke sektor informal dengan pendapatan rendah yang relatif homogen, sehingga secara statistik menurunkan ketimpangan. Temuan empiris mendukung hal ini, di mana penelitian Aufa Nadya dan Syafri (2019) serta Fatsabit dan Yusran (2019) juga menemukan bahwa pengangguran tidak selalu meningkatkan ketimpangan di Indonesia karena karakteristik pasar tenaga kerjanya.

Penelitian ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang dan meningkatkan kesejahteraan secara umum, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan. Namun, Hipotesis

Kurva Kuznets menjelaskan bahwa dalam fase awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkatkan ketimpangan sebelum akhirnya menurun. Secara empiris, temuan ini sejalan dengan penelitian Razi Rahman dan Dewi Zaini Putri (2021) serta Rifki Khoirudin dan Jannatul Liutammima Musta'in (2020) yang juga menemukan ketidaksignifikan atau pengaruh yang lemah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di tingkat regional Indonesia. Kondisi ini mengunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan manfaatnya belum terdistribusi secara merata.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian mengenai pengaruh P2P Lending, Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (2020–2024) menyimpulkan bahwa:

1. P2P Lending memiliki pengaruh negatif signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan melalui perluasan akses keuangan.
2. Pendidikan juga berpengaruh negatif dan signifikan, di mana peningkatan pendidikan masyarakat berpengaruh pada penurunan ketimpangan.
3. Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang terjadi karena homogenisasi pendapatan rendah di sektor informal saat pengangguran meningkat.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan selama periode penelitian.
5. Secara bersama-sama, keempat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan model mampu menjelaskan 97,07% variasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Pemerintah perlu mendorong perluasan dan pemerataan akses P2P Lending, terutama ke daerah pedesaan dan tertinggal, dengan regulasi yang mengarahkannya ke sektor produktif untuk mendukung pemerataan pendapatan dan pertumbuhan inklusif.
2. Prioritaskan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, untuk menciptakan SDM yang lebih produktif dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
3. Fokuskan strategi penurunan pengangguran pada penciptaan lapangan kerja formal yang produktif dan pemberdayaan sektor informal melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal untuk mengurangi homogenisasi pendapatan rendah.
4. Arahkan pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif, memastikan manfaatnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur digital.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain seperti literasi keuangan, digitalisasi, urbanisasi, struktur sektor informal, serta menggunakan metode analisis data panel dinamis untuk menangkap hubungan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Adugna, H. (2024). Fintech dividend: How would digital financial services impact income inequality across countries? *Technology in Society*, 77, 1–36. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102485>
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbas, Y., & Murinde, V. (2022). Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach. *European Journal of Finance*, 28(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335>
- Doeringer, P. B., Stoikov, J., & Piore, M. J. (1972). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. *Industrial and Labor Relations Review*, 25(2), 273. <https://doi.org/10.2307/2521766>
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011-2016). BRAWIJAYA, UNIVERSITAS.

- Firdhausy, K. A. N., Hanim, A., & Komariyah, S. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekuilibrium*, VII(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.33216>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). *BASIC ECONOMETRICS* (5th ed). New York: McGraw-Hill.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- INDEF, & Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional. Institute for Development of Economics and Finance, 1–13. <https://indef.or.id/update/detail/studi-dampak-fintech-peer-to-peer-lending-terhadap-perekonomian-nasional>
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kuznets, S. (1955). ECONOMIC GROWTH AND INCOME INEQUALITY. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28. <https://www.jstor.org/stable/1811581>
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Otoritas Jasa Keuangan, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL-POJK-Fintech.pdf>
- Putri, A. D. (2022). Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45–56.
- Sari, R. A., & Saraswati, B. D. (2022). ANALISIS PENGARUH FINTECH P2P LENDING DAN KREDIT BANK UMUM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat* Volume, 1, 16–36. <https://doi.org/https://10.24246/dekat.v1i1.4718>
- Situmorang, R. (2022). Investasi pendidikan dan pengaruhnya terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*, 9(2), 89–103.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In Pearson (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (5th ed.). UPP-STIM YKPN.